

**PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**ENDANG SRI YUNITA
NPM: 1621020505**

Prodi: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
PERSEPTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

**ENDANG SRI YUNITA
NPM :1621020505**

Prodi :Siyasah Syar'iyah (Hukumtatanegara)

Pembimbing I: Dr.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/ 2020 M

ABSTRAK

Pemerintahan yang baik merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pemerintahan yang baik tidak sebatas lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama, apa saja prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih perspektif fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah? Kedua, bagaimana perbedaan dan persamaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih menurut fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih perspektif fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih perspektif fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penulisan ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta bentuk penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda lalu menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut baru kemudian diperoleh kesimpulan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, pemerintahan yang baik dan bersih merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah pemerintahan yang baik dan bersih memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat). Adapun prinsip-prinsipnya adalah transparansi, penegakan hukum, partisipasi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Prinsip-prinsip yang ada dapat dijadikan dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna tercapainya kemaslahatan bersama.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Sri Yunita

NPM : 1621020505

Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Prinsip-prinsip Dasar Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Maret 2020
Penulis,

Endang Sri Yunita
NPM. 1621020505



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Nama : Endang Sri Yunita

NPM : 1621020505

Jurusan : Syariah

Fakultas : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Eti Karini, S.H., M.Hum.

NIP. 197111061998032005

NIP. 197308162003122003

Ketua Jurusan,

Frenki, M. Si

NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah” disusun oleh Endang Sri Yunita, NPM: 1621020505 program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S. An-Nisa:58)



PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orangtuaku yang telah berjuang untuk ku, terimakasih atas segala jerih payahmu ayahandaku tercinta (Taslim Hadi), Ibundaku tercinta (Johanah), serta kedua kakaku (Agung Jayusman, Agus Apriyanto) dan adikku tersayang (Dewi Ratna juwita), juga ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Endang Sri Yunita seorang anak perempuan yang lahir di Bandar Lampung, tepatnya pada tanggal 18 Juni 1998 yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri Taslim Hadi dan Johanah.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung Agung Bandar Lampung, lulus pada tahun 2010. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di SMPN 24 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013. Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkankehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “**PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**”. Shalawatdan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritikyang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Eti Karini S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung , kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan..
8. Penyemangatku Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan, serta kasih sayangnya.
9. Kakakku Agus Apriyanto dan Agung Jayusmanserta adik kecilku Dewi Ratna Juwita yang selalu memotivasi hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta Saudara-saudaraku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
10. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas I yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Sahabat-sahabatku grup DKC, Sahabatku Eva dan TP. Temanku Rian Dani Anjarsari, Nezzi Amerta Saputri, Wiwin Ayu Lestari, Sindika

Adelia, dan sahabat-sahabat KKN kelompok 233 di Desa Air Naningan,
Kecamatan Air Naningan, KabupatenTanggamus.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti
khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang
berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam
menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 13 Maret 2020

Penulis

Endang Sri Yunita

1621020505



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II TEORI-TEORI PERBANDINGAN HUKUM..... 12

A. Konsep Perbandingan Hukum.....	12
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	12
2. Tujuan Perbandingan Hukum	13
3. Objek Perbandingan Hukum.....	14
4. Sejarah Perbandingan Hukum.....	16
B. Tinjauan Pustaka.....	17

BAB III PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

MENURUT FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF 20

A. Konsep Fiqh Siyasah Tentang Pemerintahan yang Baik Dan Bersih.....	20
B. Latar Belakang Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.....	41
C. Konsep Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	43
D. Konsep PemerintahanPemerintahan yang Baik dan Bersih Menurut Para Ahli.....	51
E. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.....	56
F. Prinsip-Prinsip dasar Pemerintahan yang Baik	58

BAB IV ANALISIS DATA

A. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menurut Fiqh Siyasah danUndang-UndangNomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah	65
--	----

B. Perbedaan dan Persamaan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.....	67
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok bahasan dalam penulisan penelitian penulis memandang perlu menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini yang berjudul **“Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah”**.

Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.¹
2. Dasar adalah pokok atau pangkal suatu pendapat.²
3. Pemerintahan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.³
4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan dan tinjauan hukum Islam terhadap keadaan sekarang ataupun yang akan datang.⁴
5. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1102.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 296.

³Ananda Santoso Dan A.R. Al-Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: ALUMNI, 2009), H.30.

⁴Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989) h. 283.

6. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu daerah.⁶

Secara Umum dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dalam lembaga pemerintahan di Indonesia yang dapat dipadankan dengan istilah baik, bersih, dan berwibawa sesuai dengan satu kajian cukup mendasar menggunakan kajian hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadist atau sering disebut dengan Syariat.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Prinsip-prinsip Dasar Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Karena pentingnya menerapkan dan mengamalkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dan bersih dalam tata kelola pemerintahan juga dalam praktek politik sehari-hari guna mencapai praktik pemerintahan yang baik dan bersih, agar pemerintahan dapat bergerak secara sinergis tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyat.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4.

⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 345.

2. Alasan subjektif

- a. Pokok bahasan ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni yaitu Siyasah Syar'iyah
- b. Literatur dan bahan-bahan serta data-data yang diperlukan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi.
- c. Pembahasan ini belum pernah dibahas sebelumnya di Fakultas Syariah jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spriritualitasnya.⁷

Orientalis Bernard Lewis menyebutkan tugas dan kewajiban kepala Negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatn rakyatnya, yaitu

⁷A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 210-211.

membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.⁸

Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Negara, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama *fiqh siyasah*, mengenai hak dan kewajiban kepala Negara. Diantaranya yang terkenal adalah al-Mawardi. Dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala Negara yaitu:

- a. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
- b. Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakatnya, sehingga timbulah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau atas kelompok lain.
- c. Menegakkan *hudud* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bias berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
- d. Menjaga keamanan dalam negeri sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.

⁸Bernard Lewis, *The Political Language Of Islam*, (Chicago: University Of Chicago Press, 1988). h. 70.

- e. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
- f. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.
- g. Mengelola keuangan Negara seperti *ghanimah*, *al-fai'*, pajak, dan sedekah lainnya.
- h. Menentukan belanja Negara (APBN).
- i. Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut.
- j. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum.

Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.

Prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dalam masyarakat dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar. Di Indonesia, substansi wacana *good governance* dipadankan dengan istilah baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh tingkah laku pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam prakteknya pemerintah yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan juga bertanggung jawab.⁹

Di Indonesia substansi wacana *good governance* dapat di padankan dengan istilah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang

⁹Dede Rosyada, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Bekerjasama Dengan The Asian Foundation dan Pranamedia. 2000), h. 35.

baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur diberbagai tingkat pemerintah Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, dan ekonomi. Saat ini penegakan prinsip *good governance* belum bisa diterapkan sebagai mana mestinya. *Good governance* merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari para penerima amanah kepada pemberi amanah belum memuaskan bilamana kesadaran tentang bagaimana pentingnya menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance* dan kebutuhan bagi penyelenggara negara maka korupsi, nepotisme dan penyimpangan-penyimpangan lainnya dapat diminimalisir. Sejalan dengan prinsip di atas pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun dalam hasil-hasilnya semua unsur dalam pemerintah dapat bergerak secara sinergis tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyat.

Pemerintah juga bisa dikatakan baik apabila pembangunannya dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil maksimal. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri perbedaan dan persamaan prinsip-prinsip dasar Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih yang ditinjau dari Fiqh Siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah dan hukum positif.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih menurut fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih menurut fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dan bersih menurut fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dan bersih perspektif fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

G. Signifikasi/Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang *good and clean governanace* (pemerintahan yang baik dan bersih).

- b. Secara Praktis, penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama tentang prinsip-prinsip dasar *good and clean governance* (pemerintahan yang baik dan bersih) serta untuk memenuhi syarat akademik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang teliti¹⁰.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif* dan komparatif, bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹¹ Sedangkan bentuk penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dan bersih perpektif fiqh

¹⁰Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

¹¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 5.

siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan menggunakan sumber hukum primer, dan sumber hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber Hukum primer

Sumber yang diperoleh penelitian ini secara langsung yang berasal dari Al-Quran, Hadist, pendapat para ahli dan Undang-Undang Dasar beserta Undang-Undang yang berhubungan dengan kajian tentang *good and clean governance* (pemerintahan yang baik dan bersih) perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-undang.

b. Sumber Hukum sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Bahan-bahan sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber data yang diperoleh peneliti yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, jurnal dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, atau buku-buku *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹²

6. Analisis Data

Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai dokumen seperti buku, skripsi dan lain-lain yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar *good and clean governance* (pemerintahan yang baik dan bersih), kemudian digunakan analisis komparatif yaitu bentuk penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih

¹²*Ibid* , h.107.

sampel yang berbeda, menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.



BAB II

TEORI-TEORI PERBANDINGAN HUKUM

A. Konsep Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan hukum di sini ialah mencari perbedaan dan persamaan dengan member penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum serta bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.² Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja serta mencari perbedaan dan persamaannya saja melainkan perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan

¹Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Melati, 1989), h. 131.

²Sunarjati Hartono, *Kapita Slekta Perbandingan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), h. 54.

persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaan.

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya perbandingan hukum itu mempunyai tujuan yaitu:

a. Teoritis

- 1) Mengumpulkan pengetahuan baru
- 2) Peranan edukatif
- 3) Merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi.
- 4) Merupakan instrument untuk menentukan perkembangan hukum
- 5) Perkembangan asas-asas umum hukum.
- 6) Untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa.
- 7) Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok.
- 8) Sumbangan bagi doktrin.

b. Praktis

- 1) Untuk kepentingan pembentukan undang-undang
- 2) Untuk kepentingan peradilan
- 3) Penting dalam perjanjian internasional
- 4) Penting untuk kepentingan yuridis.

3. Objek perbandingan hukum

Yang menjadi objek perbandingan hukum adalah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata bisa diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum seperti syarat *causalitas* dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem bidang hukum asing diperbandingkan dengan sistem bidang hukum sendiri (*law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).³

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakikatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum itu sendiri. Rhein Stein membedakan antara uraian tentang sistem hukum asing yang disebutnya "*Auslandsrechtskunde*" dengan "*Rechtsvergleichung*". Menurutnya bahwa *Auslandsrechtskunde* harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memeperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam pandangan Rheinstein ini maka *Auslandsrechtskunde* ini harus dikuasai lebih dulu sbelum kita mulai dengan perbandingan hukum. Dalam perbandingan hukum, yang diteliti adalah hukum yang hidup (*the law in action*), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau

³Jenny Barmawi, *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika*, (Yogyakarta: Pusaka Kartini, 1989), h.18.

yang diuraikan dalam buku-buku saja (*the law in the books*) tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana berfungsi dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Cara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata berlaku disebut *functional approach*, suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Dalam memperbandingkan hukum ada dua cara yaitu memperbandingkan secara makro dan mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui dua hukum tersebut perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan, dan sebagainya, ini disebut "*tertium comparatum*".⁴

⁴*Ibid* h. 121.

4. Sejarah perbandingan hukum

- a. Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum.
Dalam karyanya *Politeia* (negara) Plato memperbandingkan beberapa bentuk negara.
- b. Aristoteles (384-322 SM) dalam politiknya memperbandingkan peraturan-peraturan dari berbagai negara.
- c. Theophrastos (372-387 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan hukum jual beli di berbagai negara.
- d. *Collatio (Mosaicarum et Romanum Legum Collatio)*, suatu karya yang penulisnya tidak dikenal, memperbandingkan antara undang-undang Mozes (*Palateuch*) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum Romawi.
- e. Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortescue pada tahun 1930.
- f. Montesquie (1687-1755) dalam *L'esprit delois* memperbandingkan organisasi dari Inggris dan Perancis.
- g. Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan semua itu dapat menemukan dasar semua hukum.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Tinjauan pustaka memuat telaah singkat dan sistem tentang permasalahan yang digali mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian.

Berikut ini saya paparkan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian saya, diantaranya yaitu:

1. “Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Mewujudkan *Good And Clean Governance* Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. Oleh: Ali Ma'ruf

Hasil penelitian, “perspektif hukum Islam tentang reaktualisasi Pancasila dalam upaya mewujudkan *good and clean governance* yaitu nilai-nilai Pancasila sangat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dalam Islam pun diajarkan bahwa pemerintah yang baik dan bersih harus ditegakkan dan berkesesuaian dengan ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

2. “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung”. Oleh: I Made Artana

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan maka semakin

meningkatkan kepuasan masyarakat pada pemerintah, pelayanan yang baik terhadap masyarakat juga menunjukkan bahwa pemerintah mengimplimentasikan prinsip-prinsip *good governance* pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali Kabupaten Buleleng.

3. “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)”. Oleh: A. Muh Ikhsan WR

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, khususnya mengenai prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum adanya produk hukum pemerintahan desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum mengenai standar operasional prosedur, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 49 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam hal ini yaitu sama-sama membahas tentang pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan teori penanganannya, berbeda dengan

penelitian yang penulis teliti dimana penelitian ini lebih membahas tentang perbandingan pemerintahan yang baik dan bersih menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Fiqh Siyasah.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fikih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* Cet. I; Bogor: Kencana, 2003
- A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Ahmad Zayyadi, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma*, Jurnal Manahij: Volume XI, Nomor 1, Juni 2017
- Ananda Santoso Dan A.R. Al-Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: ALUMNI, 2009
- Atoillah Shohibul Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1998
Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jurnal Manajemen Pembangunan, 2000 dan Pranamedia. 2000
- David Marsh Dan Gerry Stoker, *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik (Terjemahan)*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Dede Rosyada, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: Edukasi Mitra Grafika, 2017
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Umum Pemerintahan, *"Politik Lokal/Nasional Kepemimpinan Dan Good Governance, Makalah Pada Konsolidasi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Mataram, 2001
- Frans H. Winarta, *"Governance And Corruption"* Makalah, *Conference On Good Governance East Asia Realities, Problem And Challenges*, Jakarta: CSIS, 1999
- Galang Asmara, *Ombudsman Dan Good Governance*, Pekanbaru: UNRI PRESS, CetKe 1, 2006.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2009
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, Cet. VI, 1987

- Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam Pendekatan Usul Fiqh: Teori Pertingkatan Norma*, Jurnal Muqtasid: Volume 6, Nomor 1, Juni 2015
Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi Nomor. 12, Tahun 2002
- Khairuddin dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Bulan Bintang Press, 1988
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Pranamedia Group, 2014
- Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* Bandung: 1988
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- SaldiIsra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam System Presidensial Indonesia*, Jakarta: RajawaliPers, 2010
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 1985
- Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Bandung: Tarsito, 1976
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007
- Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam* Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam* Yogyakarta: Ar-Ruzz Taruna Grafika, 2000
- Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih* Cet. I; Jakarta: Pustaksa Al-Kautsar, 2001